

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk tertinggi ke empat di Dunia. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 255.993.674 jiwa atau 3,5% dari jumlah penduduk Dunia. (*Central Intelligence Agency (CIA) ; 2015*). Penduduk tersebut tersebar diberbagai pulau yang ada di Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) tinggi dan disertai dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. SDA yang melimpah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian Negara, karena tidak semua Negara di Dunia memiliki SDA seperti Indonesia, sehingga hal ini dapat menjadi satu keuntungan bagi Indonesia untuk menghasilkan produk dan jasa yang bernilai ekonomi tinggi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara makmur tetapi tidak sedikit masyarakat Indonesia yang bekerja di Luar Negeri atau sering disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sebutan TKI menunjukkan tenaga kerja yang tidak memerlukan keahlian khusus.

Untuk Negara berkembang seperti Indonesia, sebagian besar masyarakatnya masih memiliki pola pikir yang sederhana dan cenderung belum bisa mengikuti arus globalisasi yang terjadi saat ini terutama masyarakat yang tinggal di Desa, hal tersebut menjadi kendala dalam pembangunan negara karena belum bisa bersaing dengan negara lain dengan

kualitas SDM yang lebih tinggi dari Indonesia. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk mengubah tatanan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, terutama pola pikir. Dengan pendidikan, masyarakat dapat membuka pikiran mengenai berbagai hal yang ada di lingkungan selain itu, masyarakat dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan produk atau jasa agar semua kebutuhan dapat terpenuhi dalam jangka panjang sehingga kualitas hidup diri sendiri dan keluarga akan meningkat.

Tahun 2016 merupakan awal berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah sebuah agenda integritas ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalisasi hambatan dalam melakukan kegiatan ekonomi antar kawasan seperti dalam perdagangan barang, jasa dan investasi, hal ini menjadi satu tantangan besar bagi masyarakat Indonesia karena akan bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari wilayah Asia dari berbagai aspek ekonomi. Indonesia dengan jumlah tenaga kerja tinggi tanpa diiringi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan membuat jumlah pengangguran tinggi dan akan ditambah persaingan dengan tenaga kerja dari wilayah Asia, hal ini menjadi fenomena yang harus segera ditangani agar Indonesia tidak dirugikan dengan adanya MEA. Peningkatan kualitas SDM harus dilakukan dari sekarang untuk menekan paradigma mengenai rendahnya kualitas SDM Indonesia dan agar perekonomian Indonesia dapat meningkat secara merata tanpa ada kesenjangan sosial dan pendapatan antar penduduk.

Tenaga kerja menjadi input penting untuk menghasilkan barang atau jasa, oleh karena itu tenaga kerja dapat menjadi sumber potensial dalam perekonomian atau dapat menjadi masalah ekonomi apabila tidak memiliki keahlian. Analisa Lewis mengenai proses pembangunan dalam perekonomian yang menghadapi kelebihan tenaga kerja dapat dibedakan dalam tiga aspek : (i) analisa mengenai corak proses pertumbuhan itu sendiri, (ii) analisa mengenai faktor utama yang memungkinkan tingkat penanaman modal bertambah tinggi dalam proses pembangunan, dan (iii) analisa mengenai faktor-faktor yang menyebabkan proses pembangunan tidak berlaku lagi. (Lewis dalam Sadono Sukirno : 130). Analisa Lewis tepat menggambarkan keadaan Indonesia yang masih menjadi Negara berkembang.

Potensi SDA Indonesia, wilayah yang luas dan upah tenaga kerja yang masih rendah menjadi daya tarik para investor untuk melakukan investasi langsung. Pada tahun 2015 Indonesia mengalami kenaikan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 20% ke angka US\$22,6 Miliar dari US\$ 18,8 Miliar dibanding tahun sebelumnya. (*United Nations Conference Trade and Development (UNCTAD) dalam World Investment Report : 2015*). Investasi langsung yang dilakukan oleh Investor Asing maupun Investor Domestik belum mampu menyerap banyak tenaga kerja Indonesia, hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang memilih bekerja di Luar Negeri atau TKI dengan alasan upah lebih tinggi dan mencari pekerjaan di Indonesia sulit.

Dalam hal ini peran Pemerintah melalui Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI sangat dibutuhkan untuk dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan sosial, karena TKI yang bekerja di Luar Negeri tanpa keahlian (TKI Informal) memiliki resiko tinggi, oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus untuk dapat melindungi TKI yang dianggap sebagai pahlawan devisa Negeri ini, agar hak dan kewajiban TKI dapat dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Saat ini jumlah TKI yang bekerja di sektor informal masih cukup tinggi, BNP2TKI sebagai lembaga yang menaungi TKI dan Dinas tenaga kerja dan transmigrasi harus bekerja keras untuk mengurangi TKI informal agar keselamatan serta hak dan kewajiban TKI dapat dikontrol dengan baik dan benar. Berikut adalah data jumlah TKI yang dilayani dan penempatan pekerjaan, yaitu :

**Tabel 1.1**

**Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Dilayani dan  
Penempatan TKI Tahun 2011 s/d 2016 (Maret)**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Total TKI Yang Dilayani (Jiwa)</b>	<b>TKI Formal (Jiwa)</b>	<b>%</b>	<b>TKI Informal (Jiwa)</b>	<b>%</b>
1	2011	586.802	266.191	45	320.611	55
2	2012	494.609	258.411	52	236.198	48
3	2013	512.168	285.297	56	226.871	44
4	2014	429.872	247.610	58	182.262	42
5	2015	275.736	152.394	55	123.342	45
6	2016 Januari s/d Maret	59.372	32.666	56	26.706	44

*Sumber : Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO), BNP2TKI  
2016, diolah*

Dapat dilihat dari tabel 1.1 yaitu jumlah TKI yang dilayani dan penempatan TKI. Dari tahun 2011 sampai 2015 jumlah TKI yang dilayani fluktuatif tetapi jumlah TKI masih tetap tinggi dan cenderung menurun, sedangkan pada tahun 2016 dari bulan Januari s/d Maret jumlah TKI yang dilayani sudah terlihat cukup tinggi. Tingginya jumlah TKI yang bekerja di berbagai Negara di Dunia menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengandalkan bekerja sebagai TKI untuk memenuhi kebutuhan ekonomu keluarga.

Tingginya jumlah TKI dapat disebabkan pemanfaatan remitansi yang kurang baik, TKI menggunakan remitansi untuk aset tetap seperti rumah, alat mewah rumah tangga, kendaraan bermotor dll sehingga remitansi tidak menjadi produktif dan hanya bersifat jangka pendek sehingga ketika remitansi habis mantan TKI akan berangkat kembali untuk bekerja di Luar Negeri atau tingkat kesejahteraan rumah tangga akan kembali seperti awal ketika belum bekerja di Luar Negeri. Pendidikan mayoritas penduduk Indonesia yang masih rendah menjadi salah satu faktor yang dominan.

Jumlah TKI tersebut terbagi menjadi dua penempatan pekerjaan yaitu TKI yang bekerja di sektor Formal dan TKI yang bekerja di sektor Informal. TKI formal yaitu mereka yang bekerja di perusahaan atau organisasi yang berbadan hukum, memiliki kontrak kerja yang kuat, dilindungi secara hukum, di negara penempatan sehingga relatif tidak mendapatkan permasalahan selama bekerja di luar negeri. (BNP2TKI:2015). Sedangkan TKI informal atau biasa disebut *domestic worker* yaitu mereka yang bekerja

tanpa harus memiliki keahlian khusus atau TKI yang biasanya bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), mereka bekerja pada pengguna perseorangan yang tidak berbadan hukum sehingga hubungan kerjanya subjektif dan relatif rentan menghadapi permasalahan. (BNP2TKI:2015).

Dari tahun 2011 sampai 2016 (Januari s/d Maret) presentase penempatan TKI formal cenderung meningkat yaitu masing-masing 45%, 52%, 56%, 58% 55% dan 56 Hal tersebut menjadi salah satu pencapaian BNP2TKI yang sudah ditargetkan untuk menekan TKI informal agar hak dan kewajiban TKI dapat dipenuhi dengan semestinya, karena jika masyarakat Indonesia yang bekerja di Luar Negeri sudah masuk kedalam penempatan peekerja formal, maka TKI sudah memiliki jaminan keselamatan dan perlindungan hukum TKI.

Sedangkan pada penempatan TKI informal menunjukkan penurunan presentase dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 (Januari s/d Maret), penurunan TKI informal dan peningkatan TKI formal terjadi karena tiga sebab, yaitu : (1) Diberlakukan pembenahan penempatan di kawasan Timur Tengah karena Pemerintah Negara tersebut tidak dapat menjamin keselamatan TKI yang biasanya bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Karena PLRT bekerja sangat dekat dengan pemilik pekerjaan (2) Diberlakukan langkah pengetatan penempatan TKI dengan pemberlakuan durasi waktu pelatihan yang dibuktikan melalui kehadiran sistem sidik jari (*finger print*). (3) Ketersediaan tenaga kerja *unskill* di

daerah yang benar-benar berkurang. (BNP2TKI:2015).

Pencapaian BNP2TKI untuk menurunkan TKI informal sudah cukup berhasil walaupun penurunan TKI informal belum menunjukkan angka yang tinggi. Pencapaian BNP2TKI terlihat juga dari peningkatan jumlah remitansi TKI atau jumlah upah yang dikirim TKI ke Indonesia melalui Bank atau jasa peniriman uang, pada tahun 2015 sampai bulan April sebesar US\$ 3.119.459.642 sedangkan pada tahun 2014 sampai bulan April remitansi hanya mencapai US\$ 2.633.637.627,71 artinya terjadi peningkatan sebesar 15% dari tahun 2014 sampai 2015, jumlah tersebut diperoleh dari TKI formal dan informal tetapi jumlah yang lebih tinggi dari TKI formal. (Kompas : 2015). Dan diharapkan dapat terus menjadi pendorong untuk meningkatkan TKI formal dan menurunkan TKI informal.

Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang memiliki jumlah TKI tertinggi. Provinsi dengan jumlah TKI tertinggi adalah Jawa Barat dengan jumlah 13.320 jiwa pada tahun 2016 triwulan 1, tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2015 triwulan 1 jumlah TKI di Jawa Barat terjadi penurunan, jumlah TKI pada tahun 2015 triwulan 1 adalah 19.033 jiwa. (BNP2TKI:2016). Penurunan jumlah TKI pada triwulan 1 2016 dapat disebabkan karena saat ini di Jawa Barat mulai berdiri industri padat karya, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Secara jangka panjang, akan terus berdiri industri padat karya di Jawa Barat khususnya disekitar jalan Pantura, mengingat masih banyak lahan kosong sehingga berpotensi tinggi untuk didirikan industri. Berikut adalah tabel yang

menunjukkan 25 daerah di Indonesia dengan jumlah TKI tertinggi pada tahun 2016 pada bulan Januari s/d Maret, yaitu :

**Tabel 1.2**  
**Kota/Kabupaten Yang Memiliki Jumlah TKI Tertinggi**  
**Tahun 2016 (Januari s/d Maret)**

No	Daerah Asal	S.D Maret 2016 (Jiwa)
1	Indramayu	5.621
2	Lombok Timur	4.157
3	Cirebon (Kab)	2.476
4	Cilacap	2.685
5	Lombok Tengah	2.213
6	Lampung Timur	1.779
7	Cianjur	1.552
8	Kendal	1.562
9	Subang	1.640
10	Brebes	1.024
11	Ponorogo	1.354
12	Banyuwangi	1.059
13	Karawang	1.190
14	Lombok Barat	1.215
15	Blitar	963
16	Sukabumi (Kab)	653
17	Tulungagung	901
18	Sumbawa	823
19	Majalengka	621
20	Malang	828
21	Banyumas	755
22	Pati	872
23	Grobogan	433
24	Madiun	675
25	Tegal	610
26	Lainnya	21.711
<b>Total</b>		<b>59.372</b>

*Sumber : Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO), BNP2TKI 2016, diolah*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 sampai bulan maret Kabupaten Cirebon menempati urutan tertinggi keempat setelah Indramayu, Lombok Timur, dan Cilacap. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon bekerja di Luar Negeri. Jumlah TKI di Kabupaten Cirebon tahun 2016 sampai bulan Maret yaitu 2.476 jiwa.

Melihat pada lingkup yang lebih sempit yaitu Kecamatan Losari sulitnya mencari pekerjaan di daerah sendiri karena rendahnya pendidikan dan kurangnya keahlian serta rendahnya upah menjadi alasan kuat untuk sebagian besar masyarakat di Kecamatan Losari memilih menjadi TKI. Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon untuk bekerja sebagai TKI. Sampai saat ini belum ada data valid mengenai jumlah TKI yang berasal dari Kecamatan Losari, hal ini dikarenakan banyaknya calo untuk pemberangkatan TKI tanpa meminta surat rekomendasi dari Pemerintah Desa, sehingga masih banyak TKI informal di Kecamatan Losari. Walaupun demikian, diyakini bahwa Kecamatan Losari merupakan salah satu daerah asal utama TKI di Kabupaten Cirebon.

Bekerja sebagai TKI memiliki batasan umur produktif serta aturan yang sudah dibuat oleh Negara tujuan, sehingga TKI harus dapat mengatur remitansi selama menjadi TKI agar remitansi yang diperoleh menjadi produktif dalam jangka waktu panjang, remitansi yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk konsumsi agar tidak ketergantungan untuk bekerja di Luar

Negeri sebagai TKI selama hidupnya dan tidak menjadi pekerjaan yang diwariskan kepada anaknya. Sesuai dengan tujuan awal berangkat menjadi TKI ingin meningkatkan kualitas perekonomian keluarga, oleh karena itu setelah sudah menjadi mantan TKI kualitas hidup dan kesejahteraan harus lebih baik dari sebelum bekerja sebagai TKI.

Saat ini di Wilayah Cirebon banyak berdiri Industri baru, mengingat Cirebon merupakan salah satu daerah yang strategis, berada di Pantura dan akses tol mudah serta upah tenaga kerja masih rendah jika dibandingkan dengan Kota Besar lainnya. sehingga memiliki daya tarik untuk mendirikan Industri.. Namun, hal tersebut belum berdampak positif bagi masyarakat Cirebon, karena masih banyak masyarakat yang memilih bekerja di Luar Negeri, dengan berbagai faktor terutama yaitu pendidikan yang masih rendah menjadi kendala.

Masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan jumlah TKI tinggi seperti di Kecamatan Losari membuat pola pikir sebagian masyarakat bercita-cita untuk bekerja sebagai TKI yang dapat meningkatkan kesejahteraan karena dianggap dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan pencapaian yang membanggakan bagi keluarga. Hal tersebut membuat beberapa sekolah di Kecamatan Losari memberikan fasilitas kepada muridnya dengan memberikan mata pelajaran untuk Sekolah Tingkat Atas (SMA) atau sederajat dengan mata pelajaran bahasa korea, bahasa Jepang sesuai dengan ketentuan sekolah yang dianggap dapat menjadi bekal murid untuk bekerja.

Konsumsi yang dilakukan secara berlebihan tanpa berfikir jangka panjang membuat perekonomian rumah tangga seseorang tidak bisa mengalami peningkatan karena pendapatan yang diperoleh langsung habis hanya untuk konsumsi. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia dan khususnya di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, penulis ingin membuat penelitian dengan judul "**Analisis Pola Konsumsi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**" **Studi Pada Keluarga Mantan TKI di Kecamatan Losari – Kabupaten Cirebon**, pola konsumsi keluarga mantan TKI akan dibandingkan dengan pola konsumsi pada saat sebelum menjadi TKI dan sesudah menjadi TKI dengan menggunakan metode kualitatif agar mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa masalah yang akan menjadi penelitian utama, yaitu :

1. Bagaimana kondisi TKI di Kecamatan Losari ?
2. Bagaimana pola konsumsi Keluarga mantan TKI di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon sebelum dan sesudah salah satu dari anggota keluarganya bekerja sebagai TKI ?
3. Apakah terdapat perbedaan pola konsumsi dan tingkat tabungan setelah salah satu anggota keluarganya sudah menjadi mantan TKI ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui kondisi secara umum TKI yang ada di Kecamatan Losari
2. Untuk mengetahui pola konsumsi keluarga mantan TKI di Kecamatan Losari sebelum dan sesudah salah satu anggota keluarga bekerja sebagai TKI
3. Untuk mengetahui perubahan pola konsumsi dan tingkat tabungan keluarga mantan TKI sebelum dan sesudah salah satu anggota keluarga bekerja sebagai TKI.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki manfaat berupa informasi atau manfaat lain, seperti :

1. Manfaat Bagi Penulis  
Manfaat penelitian bagi penulis yaitu dapat melihat dan memahami langsung mengenai fenomena TKI di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon serta mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai pola konsumsi yang seharusnya agar dapat terus dirasakan untuk jangka panjang.
2. Manfaat Bagi Akademis  
Manfaat penelitian ini bagi akademis diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk pengemabangan penelitian selanjutnya yang lebih luas dan kompleks.

3. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Program Sarjana S1 pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung

## **1.5 Waktu Dan Tempat Penelitian**

### **1.5.1 Waktu Penelitian**

Penelitian mulai dilakukan pada tanggal 07 Maret 2016

### **1.5.2 Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang terdiri dari 10 Desa, yaitu:

- Desa Astanalanggar
- Desa Barisan
- Desa Losari Kidul
- Desa Losari Lor
- Desa Pnggangsari
- Desa Mulyasari
- Desa Kalirahayu
- Desa Kalisari
- Desa Ambulu
- Desa Tawang Sari